

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter Bangsa

Oleh: Azwar Ananda

ABSTRACT

Civics concept is a doctrine fulfilled with relationship between citizens and state. The relation set a citizen as a member of political community. Civics education is needed to create good citizens whose have nation character. Nation character is needed for unified Indonesian which consist of various differentiation. This article analyze civics education, character education, beside strategy of teaching value in building the nation character. It becomes urgent because civics education had been focusing to cognitive aspects and gave less focuse to affective and psychomotoric sides.

Key Words: Civics Education, Character Education, Nation Character

A. Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan selanjutnya disebut Pkn, dalam bahasa Inggris disebut dengan ***Citizenship Education*** atau ***Civics Education***. Untuk itu ada dua istilah yang harus diklarifikasi yaitu istilah *civics/citizenship* dan *civics education/citizenship education*. Istilah *civics* atau *citizenship* diartikan dengan kewarganegaraan, yaitu berhubungan dengan status hukum seseorang atau individu dalam organisasi yang disebut Negara-bangsa (nation state). Status tersebut diatur oleh hukum yang dibuat oleh rakyat negara tertentu melalui suatu proses sesuai sistem yang berlaku di negara tersebut, apakah sistem demokrasi atau sistem yang lainnya. Hukum tersebut menentukan hak-hak, kewajiban-kewajiban, tanggungjawab dan tugas-tugas warga Negara. Jadi *Civics* atau *Citizenship* atau kewarganegaraan adalah pola hubungan timbal balik antara pemerintah dengan yang diperintah (rakyat) dan kedua belah pihak diikat oleh seperangkat hukum atau undang-undang.

Seorang warga negara mempunyai dua lapangan kehidupan yaitu kehidupan publik (Public Life) dan kehidupan pribadi (Private Life). *Civics/Citizenship* atau kewarganegaraan terkait dengan kehidupan public seseorang tetapi ia juga memperhatikan kehidupan pribadi seseorang sebab antara kehidupan public dan pribadi

tidak bisa dipisahkan. Jadi Kewarganegaraan mengatur kehidupan individu dalam konteks hubungan antara individu dan Negara. The World Books Encycloppedia menjelaskan:

Citizenship is full membership in a nation or in some other unit of government. Citizenship also called nationality. Almost all people have citizenship in at least one country. Citizens have certain rights, such as the right to vote and the right to hold public office. They also certain duty to pay taxes and to serve on a jury (The World Books Encyclopedia, 1999, Vol.4, p.568).

Sejalan dengan hal seperti di atas, the Encyclopedia Americana menegaskan pula tentang konsep kewarganegaraan sebagai berikut:

Citizenship is a relationship between an individual and a state involving the individual full political membership in a state and his permanent allegiance to it. Others person may be subject to authority of the state and may event owe it allegiance, but the citizen has duties, rights, responsibilities, and privileges that the non citizen share to a lesser degree or not at all. The status of citizen is official recognition of the individual's integration into political

system (Encyclopedia Americana, 1999, Vol.16, p.742).

Kemudian Butts (1980:25) mengatakan bahwa

“The origins of the idea of citizenship are based upon membership in a political community regulated by man-made laws rather than upon membership in a family or tribe, kinship, religion, ethnic background or other inherited status”.

Dari beberapa pengertian dari istilah citizenship (kewarganegaraan) di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa konsep kewarganegaraan adalah suatu ajaran yang memuat pola-pola hubungan antara individu dan Negara. Hubungan dimaksud adalah hubungan yang bersifat publik karena menjadi warganegara berarti menjadi anggota *political community* dalam hal ini adalah Negara. Komunitas politik memiliki banyak aspek di dalamnya seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, hak, kewajiban dan lain-lain. Semua aspek ini diatur oleh hukum yang dibuat berdasarkan suatu proses yang berlaku di Negara tertentu.

Untuk mendidik warganegara yang baik di sebuah Negara diperlukanlah Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) atau Citizenship Education/Civics Education. Jadi Pendidikan Kewarganegaraan adalah *“ the Course of study that teach students that are necessary to live in a state or society”* (USAID, 1994:10).

Menurut definisi tersebut di atas warga Negara yang baik tergantung kepada sistem kenegaraan atau kaidah yang berlaku di Negara itu. Warganegara Amerika Serikat yang baik, sebagai contoh, hanya dapat diukur dengan sistem hukum dan sistem pemerintahan yang berlaku di Amerika Serikat. Demikian juga kiranya di Indonesia, warganegara Indonesia yang baik hanya bisa diukur dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Walaupun patut dicatat, bahwa ada kaidah-kaidah dan nilai-nilai universal yang memayungi kaidah-kaidah nasional dari negara-negara di dunia. Negara-bangsa dilarang membuat aturan-aturan hukum ataupun kebijakan yang bertentangan dengan

kaidah-kaidah dan nilai-nilai universal seperti dalam hal pelaksanaan pemerintahan demokrasi, Hak azazi manusia, keadilan, kemerdekaan dan persamaan walaupun penerapannya bisa bervariasi di setiap Negara.

Pemerintah sebuah negara mengatakan bahwa negaranya adalah Negara demokrasi, tetapi di Negara dimaksud tidak ada kebebasan pers, tidak ada penegakan HAM, tidak ada peradilan yang independen dan sederet persyaratan lainnya. Maka Negara itu tidak bisa menyebut dirinya Negara demokrasi karena demokrasi punya ukuran dan nilai-nilai/kaidah-kaidah universal yang harus dihormati.

Oleh sebab itu PKn yang dimaksud adalah PKn yang bertujuan mendidik peserta didik untuk hidup dalam sebuah Negara demokrasi. Warganegara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan agar bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik, berpartisipasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan aspek-aspek lainnya. Peserta didik harus mengerti bagaimana *“ how to guard against tyranny of majority, allow everyones, including those in the minority, to freely and fairly participate in political and civic life to influence their government and its public policy decisions”* (Vontz, 2000:36).

Banyak para pakar dan filosof yang telah mengembangkan hal yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan yang demokratik, mulai dari zaman Plato hingga pemikir-pemikir mutakhir seperti Amy Guttmann dan John Rawls. Sejauh ini, ada dua teori yang membahas pola pendidikan kewarganegaraan yang demokratik yaitu **Teori Republicanism dan Teori Democratic Liberalism**. Aristotles, Nicola Machiavelli dan Reauseau menganut teori civic republicanism sedangkan John Lock, John Stuart Mill, Thomas Hobbes, Amy Guttmann dan John Rawls adalah penganut dari teori Democratic Liberalism.

Oleh sebab itu, pola pengembangan pendidikan kewarganegaraan harus mengacu kepada kedua teori tersebut di atas. Tanpa memperhatikan teori-teori di atas yang bersifat universal mengakibatkan terjadinya

berbagai distorsi dalam praktek pendidikan kewarganegaraan. Umpamanya, bisa saja terjadi pemerintah yang sedang berkuasa melakukan penyelewengan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun loyalitas atau indoktrinasi indoktrinasi kepada peserta didik, sehingga tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warganegara yang cerdas, terampil dan berkarakter tidak tercapai. Untuk itu mari kita tinjau kedua teori dimaksud.

Teori Civics Republicanism mengajarkan bahwa kepentingan masyarakat, kebaikan bersama dan kepentingan publik adalah di atas kepentingan individu. Hal ini seperti diterangkan oleh Vontz sebagai berikut:

For civic republicans, participation in political life on behalf of common good is superior to the individual and private pursuits of family and profession, and freedom for community outweighs individual rights to liberty. Civic republicans do not rest their theory on autonomous individual, but the shared autonomy of the community. Acting alone, individuals have little or no power to effectively address social problems pertaining to peace, economic prosperity, the quality of the natural environment and so forth. Such problems require individuals acting together for the common good (Vontz, 2000:38).

Teori Civic Republicanism menekankan pentingnya “public life of the interests of community” dalam pendidikan kewarganegaraan. Menurut teori ini, individu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bertindak bersama-sama atau memperjuangkan kepentingan umum. Teori ini menekankan pentingnya kehidupan bermasyarakat atau “general will”, tetapi juga memperhatikan kepentingan individu sebab dalam kenyataan kepentingan bersama dan kepentingan individu tidak bisa dipisahkan. “*By helping to produce the general will through participation in society, citizens guarantee protection of their rights*” (Vontz, 2000:41).

Sebaliknya, **Teori Democratic Liberalism** adalah sebuah teori pemikiran politik yang menekankan pada otonomi individu, kemerdekaan dan kebebasan individu sebelum kepentingan bersama atau kemauan bersama. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu adalah merdeka dan memiliki hak-hak tertentu yang memerlukan perlindungan. Untuk itu setiap individu harus memasuki “Kontrak” untuk membentuk pemerintahan untuk melindungi hak-hak individu, kemerdekaan dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu. Tentang hal hal ini Vontz juga menjelaskan sebagai berikut:

Thus, they make a social contract that creates civil society and government by consent of the governed to guarantee their rights. Participation in public life is not primarily for common good, but for protection of personal liberty and pursuit of one’s self-interest. Therefore, liberals tend to emphasize the rights of citizenship against the power of government and society which citizens create and maintain to serve them. Individuals are free to choose, within reasonable limits that preclude interference with other people’s rights, their own particular conception of the good life. From the liberal perspective, a good society is one in which individuals are free to choose their own values and ends (Vontz, 2000:41)

Teori ini mengatakan, untuk melindungi hak-hak, kebebasan dan kemerdekaan individu, pemerintah dalam memerintah kehidupan publik harus memiliki kekuasaan terbatas. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh implementasi dari prinsip konstitusionalisme, rule of law dan prinsip-prinsip masyarakat sipil.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, harus dikembangkan mengacu kepada kedua teori tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan agar PKn di Indonesia mampu mendidik warganegara menjadi warga negara yang kompeten, cerdas dan terampil dalam menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Disamping

itu jelaslah falsafah PKn Indonesia haruslah berdasarkan ideology bangsa kita yaitu ber Pancasila.

1. Jenis Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan dapat dibagi atas dua golongan besar yaitu Pendidikan Kewarganegaraan untuk sekolah (Civic Education for School) dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk masyarakat (Civic Education for Society). Kedua golongan pendidikan kewarganegaraan ini mempunyai tujuan yang sama yaitu mendidik warganegara yang baik yaitu berpengetahuan, cerdas dan terampil dalam kehidupannya sebagai warga Negara. Berikut ini akan dijelaskan tentang kedua golongan pendidikan kewarganegaraan dimaksud.

a. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Sekolah (Civic Education For School).

Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) untuk sekolah adalah pendidikan kewarganegaraan yang wajib dilakukan di sekolah-sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta mulai dari jenjang Pendidikan usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi (PT). Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang sistem pendidikan nasional (UU No. 20/2003) yang menegaskan bahwa kurikulum sekolah harus memuat pendidikan agama, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk itu pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional beserta perangkat-perangkatnya telah membuat pedoman penulisan kurikulum tingkat satuan pendidikan melalui permen No.22/2006, 23/2006 dan 24/2006 tentang standar isi, standar kompetensi lulusan dan pedoman pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan untuk sekolah telah berjalan walaupun masih ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya.

b. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Masyarakat (Civic Education For Society).

Pendidikan Kewarganegaraan untuk masyarakat ditujukan agar semua elemen anggota masyarakat secara individu dapat mengetahui, mengerti, memahami dan melaksanakan tatakrma, tertib dan bertindak sesuai dengan norma kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Adalah sangat tidak cerdas kalau seorang individu dalam masyarakat kalau tidak mengetahui dan mengerti tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kehidupan publiknya. Membuang sampah ke dalam sungai, mematuhi peraturan lalulintas, tertib di jalan raya, membiasakan antri adalah contoh perilaku terpuji yang harus dididik kepada masyarakat agar masyarakat hidup tertib dan damai.

Sejak lahirnya era reformasi, pendidikan kewarganegaraan untuk masyarakat (civic education for society) sepertinya menjadi “daerah tak bertuan” Tidak ada satu instansipun yang memperhatikan bagaimana mendidik warganegara agar menjadi warganegara yang baik. Warganegara yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, anggota ABRI/POLRI, pegawai BUMN/Swasta, anggota DPR/DPRD, pejabat sipil militer dan lainnya, harus senantiasa dididik menjadi warganegara yang agar bisa hidup dilingkungannya secara baik. Hal ini tidak ada jaminan seorang pejabat public atau pegawai negeri sipil menjadi warganegara yang baik dilingkungan tempat tinggalnya. Apalagi saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai sopir angkot, sebagai sopir bis kota, nelayan, pedagang, pedagang kakilima, pedagang asongan, tukang becak, tukang ojek, petani yang dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dinisiasikan bagaimana menjadi warganegara yang baik. Maka mereka harus selalu dididik bagaimana hidup secara baik dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Di Negara Republik Indonesia

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting diberikan kepada seluruh warganegara Indonesia baik sedang duduk dibangku sekolah (mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi) maupun yang sudah tamat sekolah (Pegawai Negeri, Pengusaha, Sopir Angkot/Bus Kota, Anggota Parlemen nasional, kabupaten/kota, Pemimpin informal dan lapisan masyarakat lainnya).

Bagi warganegara yang duduk dibangku sekolah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting dalam rangka pembentukan kepribadian atau karakter yang cerdas. Warganegara yang baik adalah warganegara yang mencintai tanah airnya, memiliki jiwa patriotism, memiliki rasa kekeluargaan yang diwujudkan dengan disiplin diri, jujur, menghormati symbol-simbol negara, toleransi, menyadari bahwa Negara dan bangsa Indonesia adalah tanah air dimana dia hidup dan dibesarkan. Inilah yang disebut dengan *Civic Education For School* (Pendidikan Kewarganegaraan untuk masyarakat sekolah). Untuk itu, kurikulum pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi memuat mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn).

Bagi warganegara yang sudah menamatkan pendidikan formal maupun yang putus sekolah, juga harus mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Program pendidikan kewarganegaraan inilah warganegara dapat mengetahui dan memahami perkembangan dan dinamika kehidupan bersama sebagai satu Negara dan satu bangsa. Melalui pendidikan inilah mereka mengetahui adanya undang-undang baru baik berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, perda kabupaten/kota ataupun peraturan bupati/wali kota. Mereka harus diberikan juga pendidikan nilai-nilai kebangsaan seperti kejujuran, anti korupsi, taat hukum, tidak main hakim sendiri, toleransi hidup beragama, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan bersama sebagai satu Negara dan

satu bangsa. Inilah yang disebut dengan Pendidikan Kewarganegaraan untuk masyarakat (*Civic Education for Society*).

Menarik untuk dicermati bahwa sejak Era Reformasi 1998, pemerintahan reformasi membubarkan suatu lembaga yang bertugas melakukan pendidikan untuk masyarakat yaitu Badan Pembantu Presiden dalam Pemasarakatan Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila (dsingkat BP7). BP7 inilah pada zaman pemerintahan Orde Baru yang bertugas melakukan pendidikan kewarganegaraan untuk masyarakat melalui penataran-penataran bagi warga negara Indonesia seperti pegawai negeri sipil, para pejabat Negara, para pemimpin informal, para sopir angkot/Bus Kota, para tokoh agama/ ustadz dan segenap lapisan masyarakat lainnya. Tetapi sejak BP7 dibubarkan, maka sejak itu pulalah pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat (*Civic Education for Society*) tidak ada lagi dan sampai waktu buku ini ditulis belum ada satu lembaga/instansipun yang melakukan atau ditugaskan melakukan hal ini.

3. Esensi Dan Subtansi Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Yang Harus Ada Untuk Negara Demokrasi

Dalam Negara demokrasi warganegara harus dididik melalui Pkn agar memiliki pengetahuan (*knowledge*), nilai-nilai (*values/disposition*) dan keterampilan (*skills*). Ketiga hal ini akan bersinergi dan akan melahirkan warganegara yang berkompeten, berkomitmen dan konfiden sebagai warganegara, dan tentu saja diharapkan mampu mengambil keputusan dalam hal memecahkan masalah-masalah yang berkaitan kehidupan warganegara. Oleh sebab itu materi ajar yang harus ada dan tercakup dalam Pkn dalam Negara demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Aspek pengetahuan
 - struktur pemerintahan
 - undang-undang
 - hak dan kewajiban
 - perpajakan
 - kekuasaan pemerintahan Negara
 - sistem politik

- hak azazi manusia
- multikulturalisme
- anti kekerasan
- b. Aspek Nilai dan Sikap
 - kesadaran kebangsaan/nasionalisme
 - menghormati simbol kenegaraan
 - kejujuran
 - patuh pada hukum
 - disiplin
 - toleransi
 - menghormati harkat dan martabat manusia
 - menghargai pendapat orang lain
 - anti kekerasan
 - multikulturalisme
 - tidak membedakan manusia berdasarkan atas suku, agama, ras, warna kulit dll
 - kekeluargaan
- c. Aspek Keterampilan
 - mendengarkan pendapat orang lain
 - menyalurkan pendapat
 - mengkritisi kebijakan publik
 - berkomunikasi
 - bertanggungjawab
 - mematuhi peraturan
 - membiasakan antri
 - membaca informasi
 - menulis
 - berfikir
 - memimpin sidang/rapat
 - menulis surat/petisi/keputusan.

Kemudian Butts (1980) juga mengusulkan 10 (sepuluh) konsep dasar PKn yaitu meliputi:

- *Justice*
- *Freedom*
- *Equality*
- *Diversity*
- *Authority*
- *Privacy*
- *Due to process*
- *Participation*
- *Personal obligation and public good*
- *International human rights*

Melengkapi materi ajar ini USAID (1994) juga mengusulkan konsep dasar dan materi ajar yang harus tercakup dalam PKn yaitu:

- d. *Knowledge*
 - *knowledge based*
 - *history*
 - *geography (Culture and economic)*
 - *economic System*
 - *political system*
 - *social system and institution*
 - *world reality*
 - *humanities*
 - *moral education*
 - *alternative social arrangement*
 - *differences (ethnic, cultural, racial, political)*
 - *human rights*
 - *element of true democratic (rights, solidarity, tolerances, respect)*
 - *country constitution*
 - *country government*
 - *multiculturalism*
- e. *Values :*
 - *respect (self and other)*
 - *principle of democratic life*
 - *respect and defend human rights*
 - *care about other*
 - *souvereignty of people*
 - *justice*
 - *freedom*
 - *equality*
 - *authority*
 - *diversity*
 - *privacy*
 - *due to process*
 - *participation*
 - *responsibility (personal. Civics, social)*
 - *rule of law*
 - *civility*
 - *truth*
 - *tolerance*
 - *assistance of bothers*
 - *civic sense*
- f. *Skills*
 - *critical thinking*
 - *independent thinking*
 - *problem solving*
 - *literacy*
 - *communication/dialog*
 - *decision making*

- *assessment of political situation*
- *cooperation*
- *protection and promotion of ones interests and values*
- *productive participation in work force*
- *political, social, civics participation*
- *community service*
- *personal and social responsibility*
- *dealing with differences*
- *leadership*

B. Pendidikan Karakter Bangsa

1. Pengertian Karakter dan Nilai-nilai Karakter.

Karakter berasal dari kosa kata Bahasa Inggris *Character*, yang berarti keperibadian, perilaku yang menjadi ciri khas seseorang yang membedakan seseorang dengan orang lain. Untuk jelasnya kita kutip beberapa pendapat para penulis yang mendalami tentang pengertian karakter. Erie Sudewo dalam bukunya "*Best Practice Charater Building: Menuju Indonesia lebih baik*" (2011:14) mendefinisikan Karakter "sebagai kumpulan sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari, sebagai perwujudan kesadaran menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dalam mengemban amanah dan tanggung jawab".

Selanjutnya Erie Sudewo menguraikan bahwa karakter dapat dibedakan atas dua kategori yaitu a). Karakter Pokok dan b). Karakter Pilihan. Karakter pokok harus dimiliki oleh semua orang apapun profesinya dan dimanapun ia berkarya. Karakter pokok dibedakan atas tiga yaitu karakter dasar, karakter unggul dan karakter pemimpin. Karakter dasar menjadi inti karakter pokok yaitu **tidak egois, jujur dan disiplin**. Karakter unggul dibentuk oleh tujuh sifat baik yaitu: **ikhlas, sabar, bersyukur, bertanggungjawab, berkorban, perbaiki diri dan sungguh-sungguh**. Karakter pemimpin dibentuk oleh Sembilan sifat baik yaitu: **adil, arif, bijaksana, ksatria, tawadhu, sederhana, visioner, solutif, komunikatif dan inspiratif**. Kemudian Karakter Pilihan, adalah karakter baik yang harus dimiliki oleh seseorang sesuai dengan profesinya. Karakter guru tentulah sangat

berbeda dengan karakter pengusaha dan berbeda pula dengan karakter pengacara. Karakter pilihan ini haruslah dibangun berdasarkan karakter pokok terlebih dahulu (Sudewo, 2011:16).

Sudewo (2011:47) orang pintar saja tidak cukup untuk membangun Indonesia, hanya orang mengetahui tujuan Indonesia yang bisa membangun Indonesia, Untuk itu diperlukan pendidikan karakter. yang terbentuk dalam waktu yang lama. Jadi Karakter adalah perilaku seseorang yang telah terbentuk melalui suatu proses pendidikan baik di rumah tangga, sekolah dan masyarakat.

Selanjutnya Prayitno (2010:24) menuliskan bahwa "Karakter adalah sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma". Lebih jauh prayitno menguraikan arti dari karakter sebagai berikut:

- a. Sifat pribadi: ciri-ciri yang ada didalam pribadi seseorang yang terwujudkan dalam tingkah laku.
- b. Relatif stabil: suatu kondisi yang apa bila telah terbentuk akan tidak mudah diubah
- c. Landasan: Kekuatan pengaruhnya sangat besar/dominan dan menyeluruh terhadap hal-hal yang terkait langsung dengan kekuatan yang dimaksud.
- d. Penampilan perilaku: aktifitas individu atau kelompok dalam bidang dan wilayah (*setting*), kehidupan sebagaimana tersebut di atas.
- e. Standar nilai/norma: kondisi yang mengacu kepada kaidah-kaidah agama, ilmu dan tehnologi, hokum, adat dan kebiasaan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari (Prayitno, 2010:24).

Kemudian Khan (2010) menuliskan "Karakter adalah sikap pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan" (Khan: 2010:1). Pendidikan Karakter menurut Khan adalah mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan berperilaku guna membantu individu untuk hidup dan berkerja bersama sebagai keluarga, Masyarakat dan bernegara dan membantu mereka untuk membuat

keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Seorang warga Negara yang berkarakter cerdas tentunya mengerti, memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang membuat ia (warganegara) tersebut diterima hidup ditengah lingkungan keluarga, masyarakat, nagara dan bangsa. Nilai-nilai itulah yang menjadi objek enkulturasi dalam pendidikan karakter pada semua lingkungan dan jenjang pendidikan di Indonesia.

Suciptoardi (2011) menuliskan bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Lebih jauh Suciptoardi(2011) menguraikan secara lebih rinci nilai-nilai karakter yang harus dienkulturasikan kepada setiap warganegara Indonesia melalui program pendidikan karakter. Dia menguraikan sebagai berikut:

1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan
 - Religius: Pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.
2. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri
 - a. Jujur: Prilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan baik terhadap diri dan pihak lain.
 - b. Bertanggungjawab: Sikap dan prilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya) Negara dan Tuhan Yang Mahaesa
 - c. Bergaya hidup sehat: segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang mengganggu kesehatan.

- d. Disiplin: Tindakan yang menunjukkan prilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
 - e. Kerja keras: Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/kerja) dengan sebagik-baiknya.
 - f. Percaya diri: Sikap yakin dan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapnya
 - g. Berjiwa wirausaha: Sikap prilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya
 - h. Berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif: Berfikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki
 - i. Mandiri: Sikap prilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
 - j. Ingin tahu: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar
 - k. Cinta ilmu: Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.
3. Nilai Karakter dalam hubunganyab dengan sesama
 - a. sadar akan akan hak dan kewajiban diri dan orang lain: sikap tahu diri dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain.
 - b. Patuh pada aturan-aturan sosial: sikap menurut dan taat terhadap aturan-

- aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.
- c. Menghargai karya dan prestasi orang lain: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
 - d. Santun: Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata prilaku kesemua orang
 - e. Demokratis: Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
4. Nilai Karakter dalam hubungannya dengan lingkungan
- a. Peduli sosial dan lingkungan: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
 - b. Nilai kebangsaan: Cara berfikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
 - c. Nasionalis: Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya
 - d. Menghargai keberagaman: Sikap memeberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku dan agama (Suciptoardi, 2011).

Dalam Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa (Depdiknas: 2010) mengemukakan ada 18 (delapan belas) nilai karakter bangsa yang harus dikembangkan secara sungguh-sungguh. Kedelapan belas karakter bangsa dimaksud adalah:

1. **Religijs:** Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan selalu hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. **Jujur:** Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
3. **Toleransi:** Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. **Disiplin:** Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. **Kerja Keras:** Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. **Kreatif:** Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. **Mandiri:** Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. **Demokratis:** Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. **Rasa Ingin Tahu:** Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar.
10. **Semangat Kebangsaan:** Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya
11. **Cinta Tanah Air:** Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. **Menghargai Prestasi:** Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

13. **Bersahabat/Komunikatif** : Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. **Cinta Damai**: Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. **Gemar membaca**: Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. **Peduli Lingkungan**: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. **Peduli Sosial**: Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. **Tanggung-Jawab**: Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Naskah akademik Pendidikan karakter di perguruan tinggi, Dirjendikti-Depdiknas (2011) menguraikan bahwa pendidikan karakter ditujukan untuk membina aspek terdalam dari diri manusia yaitu olah hati, olah pikir, olah kinestetik dan olah rasa dan karsa. Menurut naskah akademik ini keempat olah aspek internal manusia tersebut menganut nilai-nilai yang harus diinternalisasikan sebagai berikut:

1. Karakter yang bersumber dari olah hati: Beriman dan bertaqwa, Jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggungjawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik.
2. Karakter yang bersumber dari olah pikir: Cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks, dan reflektif
3. Karakter yang bersumber dari olah kinestetik: bersih dan sehat, sportif,

tangguh, handal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria dan gih.

4. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa: kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah hormat, toleran, nasionalis, Peduli, kosmolit (mendunia), mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air (patriotis), bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja (Depdiknas, 2011:46)

Kemudian di dalam Naskah Akademik Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi (2011) menyimpulkan ada empat nilai utama yang menjadi tujuan pendidikan karakter di perguruan tinggi yang , menurut analisa penulis juga bisa dipedomani dalam melaksanakan pendidikan karakter pada pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 1.

Empat Karakter Cerdas di Perguruan Tinggi

No.	Nilai-nilai Dasar Pendidikan Karakter	Deskripsi
1.	Jujur	Lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, ikhlas
2.	Tangguh	Sukar dikalahkan, kuat, andal, kuat sekali pendirinya, tabah dan tahan menderita
3.	Cerdas	Sempurna perkembangan akal budinya untuk berfikir, tajam pikirannya
4.	Peduli	Mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan

Sumber: Naskah akademik Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi, 2011.

Selanjutnya Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) menguraikan bahwa nilai-nilai karakter yang dikembangkan dan dienkulturasikan kepada semua warganegara haruslah bersumber dari ideology dan dasar negara yaitu Pancasila. LPPKB mengemukakan ada 11(sebelas) inti yang harus dihayati dalam kehidupan bernegaraan yaitu: kedamaian, Keimanan, Ketaqwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban, persatuan dan kesatuan, mufakat, kebijaksanaan dan kesejahteraan (LPPKB, 2005).

2. Pengertian Karakter Kebangsaan

Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara. Adapun pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar dari nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman.

Kalau kita analisa secara mendalam tujuan pendidikan nasional di Indonesia, maka masalah karakter dapat dibedakan atas dua (2) dimensi. **Pertama. Karakter Pribadi.** Karakter Pribadi adalah pendidikan karakter untuk membentuk manusia Indonesia menjadi manusia yang berkarakter cerdas secara pribadi. Karakter pribadi inilah yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan, lingkungan keluarga dan masyarakat. Karakter yang harus dimiliki secara pribadi ini adalah karakter yang akan mendukung seorang manusia Indonesia yang menjadi warga negara agar cerdas mengurus diri sendiri dalam semua lapangan kehidupan yaitu, secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Karakter ini setidaknya

ditandai oleh kepemilikan sifat-sifat baik atau perilaku baik seperti taqwa pada Tuhan Yang Mahakuasa, jujur, pekerja keras, disiplin, berakhlak mulia, beradab, taat azas dan hukum, rajin, bertanggungjawab dan mampu mengurus diri sendiri dan ikut serta mengurus lingkungan tempat tinggalnya agar selalu aman, tenteram dan kondusif untuk semua kegiatan masyarakat.

Dimensi kedua adalah Karakter Kebangsaan. Karakter kebangsaan adalah karakter yang diperlukan agar setiap orang Indonesia yang majemuk dan penuh dengan perbedaan-perbedaan ini mampu dan bisa hidup bersama sebagai sebuah bangsa yang besar yaitu Bangsa Indonesia. Maka karakter kebangsaan adalah karakter agar bangsa Indonesia yang majemuk ini tetap merasa sebagai satu keluarga besar yang walaupun berbeda-beda akan tetapi tetap menjadi satu yaitu Bangsa Indonesia. Untuk menanamkan karakter kebangsaan ini kepada setiap pribadi atau setiap warganegara Indonesia diperlukan Pendidikan Karakter Bangsa. Pendidikan karakter bangsa adalah pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai dan perilaku baik agar setiap warganegara mampu hidup rukun, damai, bekerjasama dan berjuang secara kolektif untuk kemajuan bangsa Indonesia. Perilaku baik atau pendidikan karakter kebangsaan ini ditandai oleh kepemilikan perilaku baik atau sifat-sifat baik yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia, jujur, nasionalisme, patriotisme, rela berkorban untuk bangsa, kekeluargaan, menghormati keberagaman, toleransi, tidak membedakan suku, agama dan ras. Dengan demikian kita yang berasal dari berbagai suku, agama dan ras tetap mantap sebagai sebuah bangsa yaitu bangsa Indonesia.

3. Pendidikan Karakter Kebangsaan di Indonesia

Kalau kita cermati satu dekade terakhir, maka Penulis sebagai seorang yang menekuni Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) dapat memaparkan secara faktual betapa menyedihkannya karakter bangsa Indonesia saat ini. Secara **Karakter Pribadi** umumnya warganegara Indonesia sangat

mementingkan diri sendiri, keluarga dan kelompok masing-masing. Hal ini diiringi pula oleh sikap dan perilaku tidak jujur, mental menerabas, tidak patuh pada hukum, KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme), tidak mengutamakan profesionalisme dan abai terhadap nilai-nilai etika dan sopan santun. Kemudian secara **Karakter Kebangsaan** lebih menyedihkan lagi. Antara suku satu dengan suku yang lain tidak lagi merasa sebangsa, antara satu sekolah dengan sekolah lain tidak lagi merasa satu bangsa, antara desa dengan desa lain tidak lagi rukun, antar kelompok pemuda dengan kelompok pemuda juga tidak rukun. Mungkin Partai politik yang ada juga tidak merasa memiliki bangsa ini. Kita sebagai bangsa yang majemuk dan plural tidak lagi menyadari bahwa ada sekumpulan nilai-nilai yang harus kita miliki bersama demi menjaga keutuhan Indonesia sebagai satu bangsa. Nilai-nilai itu antara lain patriotisme, nasionalisme, kekeluargaan, toleransi, saling menghargai antar sesama, saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Apapun sukunya, agamanya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote harus menjadi satu dan bangga menjadi satu bangsa yaitu “Kami Bangsa Indonesia”.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut tentulah tidak mudah dan tidak mungkin tercapai tanpa usaha nyata dan kerja keras. Untuk itulah kita perlu memprogram pendidikan nilai-nilai kebangsaan kepada semua elemen bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia kembali menyadari bahwa mereka adalah satu bangsa yang besar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia telah menggariskan bahwa kelestarian Indonesia sebagai sebuah bangsa harus dijaga dan dibela. Maka MPR mengemukakan ada empat pilar yang menopang kehidupan Karakter Kebangsaan Indonesia yaitu:

- NKRI
- UUD45
- Pancasila
- Bhineka Tunggal Ika

Untuk memberi makna bagaimana empat pilar kehidupan bangsa ini bisa dipahami dengan baik, maka berikut ini akan diuraikan sebuah analisa sehingga kita sebagai anak bangsa bisa mengerti bahwa kita ini memang hidup didalam sebuah bangsa yang majemuk dan plural.

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat diibaratkan sebagai sebuah “Rumah Besar” tempat tinggalnya 240 juta jiwa lebih warganegara Indonesia. NKRI terletak secara astronomis antara 6 derajat Lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 145 derajat bujur timur. Secara fisik NKRI membujur dari barat (Kota Sabang) diujung utara Pulau Sumatera sampai ke kota Merauke diujung timur pulau Papua. NKRI membentang dari pulau Miangas di utara sampai ke pulau Rote di bagian selatan.

“Rumah Besar” yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia itu luas daratannya kira-kira 1.922.570 km² dan luas lautnya 3.257.483 km². NKRI ini dihuni oleh lebih kurang 240 juta penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, memeluk enam agama resmi (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu). Setiap suku mempunyai adat istiadat, budaya dan cara hidup sendiri. Itulah sebabnya NKRI itu disebut Negara manjemuk dan sangat pluralis.

b. Pancasila

Pancasila adalah dasar dan Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar dan falsafah NKRI ini haruslah menjadi ideologi, standar berfikir dan pedoman dalam pemecahan masalah-masalah dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Tidak dibenarkan seorang warganegara dalam kehidupan berbangsa bernegara menggunakan pola berfikir yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah Negara yang digali dan dirumuskan oleh para pendiri negara melalui sebuah badan bernama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI). Hasil kerja BPUPKI ini disahkan sebagai dasar Negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun kelima sila Pancasila yang merupakan dasar Negara NKRI yaitu:

1. Ketuhanan yang Mahaesa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Bearadab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Inilah yang menjadi dasar falsafah Negara, sumber hukum bagi warganegara yang mendiami “Rumah Besar” yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak dibenarkan satu suku bangsa/kelompok/golongan/partai politik menggunakan dasar falsafah selain Pancasila dalam memecahkan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD45).

Warganegara yang jumlahnya lebih kurang 240 juta jiwa, mendiami lebih dari 17 ribu pulau dan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa serta adat istiadat haruslah memakai, mematuhi dan tunduk pada hukum tertinggi serta turuananya yaitu UUD 45. UUD45 yang bentuk aslinya terdiri dari Pembukaan (empat alinia), 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan serta 2 ayat aturan tambahan serta ditambah dengan penjelasan resmi UUD 45. Dalam interaksi resmi atau tidak resmi, memecahkan masalah kenegaraan dan kebangsaan harus berpedoman kepada UUD45 yang disahkan berlaku di NKRI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Akan tetapi sejak tahun 1998 (Zaman Reformasi), UUD 45 telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali. Pada tahun ini (2012), UUD 45 yang telah diamandemen mengalami perubahan yang sangat drastis sehingga mengalami penambahan pasal-pasal dan ayat-ayat yang begitu banyak. Namun pada hakekatnya NKRI tetap memakai UUD45 sebagai aturan

utama yang mengatur warganegara yang mendiami “Rumah Besar” yang bernama Negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Bhineka Tunggal ika.

Bhineka tunggal ika adalah semboyan hidup/prinsip hidup yang wajib dianut oleh warganegara yang menghuni “Rumah besar” besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip hidup Bhineka Tunggal Ika ini dicengkram sangat kuat oleh kedua kaki lambang Negara NKRI yaitu Garuda Pancasila.

Dalam pengamalan ajaran Bhineka Tunggal Ika ini, setiap pribadi, kelompok, golongan, penganut agama, suku bangsa, warna kulit yang berbeda harus menyadari sesadar-sadarnya dan menerima secara sungguh-sungguh bahwa kita yang hidup di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia ini memang ada yang berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan yang ada ini adalah berkat rahmat dan ciptaan Tuhan yang Mahaesa. Tidak satupun manusia yang bisa mempersamakan, menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada diantara bangsa Indonesia ini. Oleh sebab itu prinsip hidup Bhineka Tunggal Ika haruslah menjadi amalan kita sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kehidupan sehari-hari, janganlah perbedaan-perbedaan yang ada pada suku bangsa, agama dan ras menjadi penyebab terjadinya perselisihan, perkelahian ataupun huru hara, karena perbedaan itu tidak mungkin dihilangkan. Akan tetapi mari kita saling menghormati, saling menghargai, tidak saling mengganggu dan bertoleransi yang amat besar dalam kehidupan sesama warganegara dalam “Rumah Besar” Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kalau diulas prinsip hidup Bhineka Tunggal Ika ini secara akademis, maka penekanannya adalah pengakuan suatu ideologi yang diletakkan di atas pengakuan dan penghargaan atas realita adanya keragaman budaya (Kariyawan, 2012). Setidaknya ada tiga pola perilaku yang menyebabkan terjadi perselisihan, benturan dan kesalahpahaman yaitu stereotip,

etnosentrisme dan primordialisme. Stereotipe adalah adanya prangka yang tidak baik antara elemen-elemen yang berbeda di tengah masyarakat. Etnosentrisme adalah menilai orang lain atau kelompok atau suku bangsa lain dengan budaya kita sendiri. Primordialisme adalah sifat merasa unggul dari suku bangsa ataupun daerah lain. Untuk itu diperlukan pendidikan karakter bangsa maupun pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya menyadari dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada.

Berdasarkan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini, maka bangsa Indonesia sudah seyogianya menanamkan dalam dirinya bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dituntun oleh norma, nilai dan falsafah yang telah ditetapkan dalam konsensus nasional tanggal 18 Agustus 1945. Sejak itu sampai hari ini kita tetap bersatu dan akan tetap bersatu sebagai sebuah negara-bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Strategi Pembelajaran Nilai Dalam Pembentukan Karakter Bangsa

1. Pengertian Pembelajaran Nilai

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Oleh sebab itu pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU. No.2/1989).

Pendidikan pada hakekatnya adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia berarti membudayakan (*civilized*) manusia. Oleh sebab itu pendidikan sangat berkaitan dengan kebudayaan. Bahkan banyak para ahli yang berpendapat bahwa pendidikan adalah proses penyampaian kebudayaan dari satu generasi berikutnya

(*transmission of culture*). Kebudayaan itu termasuk didalamnya keterampilan, pengetahuan, sikap-sikap, nilai-nilai serta pola-pola tingkah laku (Manan,1988:7). Oleh sebab itu dapat dikatakan isi dari pendidikan adalah penyampaian kebudayaan.

Salah satu unsur dari kebudayaan manusia adalah nilai-nilai, ide-ide dan norma-norma dimana nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma itu hidup didalam suatu masyarakat. Berbicara mengenai nilai ada dua jenis nilai yaitu nilai inti (*solid core values*) dan nilai-nilai baru (*emergent values*). Kedua jenis nilai ini selalu ada dalam setiap masyarakat sebab nilai-nilai itu bersifat dinamis dan selalu berkembang. Perkembangan itu terjadi akibat inovasi atau temuan baru atau mungkin juga akibat pertemuan antara satu nilai dengan nilai lain dari masyarakat yang berbeda.

Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan, nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma yang selalu hidup dan dihormati oleh setiap anggota masyarakat. Jadi pendidikan adalah proses penyampaian kebudayaan, maka kebudayaan yang disampaikan adalah kebudayaan yang hidup dimana pendidikan itu dilaksanakan. Hal ini ditujukan agar anak didik tidak tercabut dari akar budayanya sendiri. Dalam hal itu tentu saja tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku secara universal atau nilai-nilai yang telah diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Tulisan ini akan membahas masalah moral dan etika dari perspektif pendidikan, agar kita bisa mengerti bahwa moral dan etika (aspek efektif) adalah sangat penting diperhatikan dalam memanusiakan manusia dalam pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Salah satu mata pelajaran yang diwajibkan di sekolah-sekolah di Indonesia adalah Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran PKn dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia/kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan

terhadap hak azazi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, sikap prilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme (Permendiknas No.22/2006). Selanjutnya diuraikan bahwa mata pelajaran Pkn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara indnsia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatka oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas No.22/2006).

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa mata pelajaran PKn memuat aspek Kognitif, Afektif dan Psychomotor sekaligus. Selama ini pembelajaran PKn hanya terfokus pada aspek kognitif saja, sedangkan aspek affektif dan aspek psychomotor kurang mendapat perhatian. Oleh sebab itu pembelajaran PKn pada masa depan harus memperhatikan ketiga aspek (kognitif, affektif dan psychomotor) secara seimbang dan selaras.

2. Mengenal Aspek Afektif

Bloom (1956) dalam bukunya “Taxonomy of educational objectives” dan Actions (keterampilan). Kemudian Bloom (1956 : 7) menegaskan bahwa affektif adalah :

Objectives which emphasize a feeling tone, an emotion, or a degree of acceptance or rejection. Affective objectives vary from simple attention to selected phenomena to complex but internally consistent qualities of character and consciences. We found a large number of such objectives in the literature expressed as interests, attitudes, value, emotional sets or biases.

Terlihat bagi kita bahwa aspek afektif adalah aspek yang menyangkut emosi, rasa, sikap, cipta dan karsa dari manusia atau aspek internal terdalam dari diri manusia yang meliputi rasa, cipta dan karsa. Aspek terdalam inilah yang menjadi objek binaan proses pembelajaran Pkn.

Kalau kita bandingkan antara ketiga aspek tersebut (kognitif, afektif dan psychomotor) jelaslah memiliki karakteristik tersendiri. Aspek kognitif meliputi aspek berhubungan pengetahuan dari manusia. Pengetahuan bisa bersifat fakta, konsep ataupun generalisasi. Metode memperoleh pengetahuan adalah dengan mempelajari fakta. Konsep dan generalisasi tersebut melalui mendengar, melihat ataupun mengalami. Sedangkan aspek afektif adalah pola sikap yang bisa dilihat dari perilaku seseorang. Metode memelajarinya juga berbeda, aspek afektif tidak bisa diajarkan akan tetapi dengan membinaanya secara terus menerus melalui pembinaan sikap dan nilai-nilai. Aspek psychomotor adalah aspek keterampilan yang bisa dipelajari melalui pelatihan-pelatihan yang walaupun tidak mungkin seseorang bisa melakukan sesuatu tanpa tahu terlebih dulu. Bloom juga menguraikan hierarki dari aspek ini. Mari kita lihat perbandingannya pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2.
Perbandingan antara Aspek Kognitif, Afektif, sosial dan keterampilan

<i>Cogntitives Outcomes</i>	<i>Affectives Outcomes</i>	<i>Social Skilss</i>	<i>Skills Outcomes</i>
<i>Knowledges</i>	<i>Receiving</i>	<i>Languange Development</i>	<i>Imitation</i>
<i>Comprehension</i>	<i>Responding</i>	<i>Communication</i>	<i>manipulation</i>
<i>Application</i>	<i>Valuing</i>	<i>Teamwork</i>	<i>precision</i>
<i>Analysis</i>	<i>Organization</i>	<i>Management</i>	<i>articulation</i>
<i>Synthesis</i>	<i>Characterizati on by a value or value complex</i>	<i>Assessment</i>	<i>naturalization</i>
<i>Evaluation</i>	-		

Note : Diadaptasi dari Bloom (1956); Buku II, hal. 35

Jadi aspek efektif juga mempunyai herarki dari yang paling sederhana ke yang sangat kompleks. Pengajaran aspek kognitif agar menyentuh level analisa atau sistensa tentu berbeda dengan yang hanya menyentuh level pengetahuan. Demikian juga kalau ingin terjadi perubahan yang permanen terhadap aspek afektif maka pengajarannya harus direkonstruksi sedemikian rupa agar menyentuh level pembentukan karakter pada aspek afektif.

Aspek afektif dalam istilah sehari-hari mungkin lebih dikenal dengan muatan (konten) seperti moral, etika dan nilai-nilai lainnya. Oleh sebab itu kalangan akademisi lebih familiar dengan istilah moral dan etika jika dibandingkan dengan istilah afektif. Tulisan ini akan memakai kedua istilah tersebut dalam makalah ini. Pada masa kini mungkin lebih dikenal dengan istilah karakter.

3. Perkembangan Aspek Afektif (Moral Dan Etika)

Sebagaimana diketahui Kohlberg (Bertens, 1997) menguraikan enam tahap perkembangan aspek atau moral dan etika. Keenam tahap ini didahului oleh fase pramoral dari umur 0-6 tahun. Pada usia ini anak belum bisa mempertimbangkan baik atau buruk, boleh-atau tidak boleh atau patut-tidak patut atas perbuatannya. Walaupun demikian pendidik tetap berkewajiban menanamkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini terhadap anak-anak melalui contoh teladan, mempelajari hal-hal yang baik melalui cerita dan media lainnya. Hal ini ditujukan agar anak secara dini mengenal norma, nilai moral dan etika yang kelak berguna dalam hidup dan kehidupannya.

Kemudian keenam fase perkembangan moral dan etika ialah:

I. Tingkat Prakonvensional (7-9 tahun).

Tingkat ini dibagi dua yaitu :

- a. Orientasi hukuman dan kepatuhan. Anak mendasarkan perbuatannya atas otoritas kongkret (orangtua, guru) dan atas hukuman yang akan menyusul bila tidak patuh.
- b. Orientasi relativis instrumental. Perbuatan adalah baik, jika instrument dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain.

II. Tingkat Konvensional (10-13 tahun).

Tingkat ini dibagi dua yaitu :

- a. Penyesuaian dengan kelompok. Pada periode ini anak mulai belajar menjadi anak manis dengan mengarahkan diri pada keinginan orang sekelilingnya

- b. Orientasi hukum dan ketertiban (Law and order)

Penyesuaian berkembang pada kelompok abstrak seperti negara, suku bangsa dan agama.

III. Tingkat Pascakonvensional (14 tahun keatas)

- a. Orientasi Kontrak sosial Legalitas. Pada tahap ini manusia sudah mencapai konsensus, perjanjian dan sudah mampu membentuk hukum untuk kehidupan sosialnya.

- b. Orientasi pada prinsip etika yang universal. Pada tahap ini manusia sudah mengatur tingkah laku dan penilaian moralnya berdasarkan hatinurani pribadi dan orang lain. Pada tahap ini manusia juga sudah mampu menilai diri berdasarkan kaidah-kaidah universal seperti perdamaian hak manusia, keadilan, persamaan di depan hukum dan kaidah lainnya. Menurut Kohlberg hanya sedikit orang yang mencapai tahap ini.

4. Postulat-Postulat Dalam Pembelajaran Afektif (Moral Dan Etika)

Yang dimaksud dengan postulat dalam aspek efektif (Moral dan Etika) adalah kebenaran-kebenaran yang diterima tanpa perlu pembuktian dan dipakai sebagai dasar untuk pengembangan moral dan etika itu sendiri. Makmurtomo & Soekarno (1989) mengemukakan ada tiga postulat utama yang dipegang oleh etika :

1. Adanya Tuhan (*The Exisence of God*)

Tuhan adalah sumber kebaikan tertinggi. Tuhan bukan saja sebagai pencipta manusia tetapi sekaligus sebagai tujuan akhir hidup manusia. Tuhan adalah pembuat norma-norma absolute yang menjadi sumber dari norma-norma yang lain dalam kehidupan manusia. Demikian keyakinan akan adanya Tuhan adalah dasar norma yang hakiki dalam hal yang berhubungan dengan moral dan etika.

2. Kemerdekaan Kehendak (*The Freedom of will*)

Kebebasan kehendak manusia memungkinkan manusia untuk memilih, menimbang dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu kebebasan kehendak manusia adalah mutlak diperlakukan dalam pembinaan dan pengembangan moral etika manusia.

3. Kekekalan Jiwa (*The Immortality of Soul*)

Kekekalan jiwa (roh) akan mendorong manusia melakukan perbuatan baik dalam hidupnya. Keyakinan terhadap hal ini akan menimbulkan perilaku yang baik, walaupun perbuatan-perbuatan baiknya belum mendapat balasan dalam kehidupan dunia, maka ia yakin akan menerimanya setelah meninggalkan dunia fana ini.

Ketiga postulat ini adalah dasar pengembangan filsafat moral dan etika dalam kehidupan manusia dan juga menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak dan mempertimbangkan apakah sesuatu itu baik atau tidak untuk dilakukan.

5. Pendidikan Moral Dan Etika (Aspek Afektif)

Pendidikan yang menyangkut aspek afektif (moral dan etika) adalah pendidikan yang seharusnya menyentuh aspek afektif manusia yang paling dalam. Pengalaman menunjukkan kalau pendidikan afektif (moral dan etika) tidak menyentuh aspek yang paling dalam dari manusia, maka peserta didik hanya mengetahui kaidah moral dan etika dengan baik (moral dan etika kognitif), tetapi tidak melakukannya dalam perbuatan sehari-hari (afektif). Itulah yang kita lihat selama ini. Banyak orang tua dan masyarakat mempertanyakan mengapa moral, etika, sopan santun generasi muda cenderung menurun. Maka permasalahannya adalah bagaimana pendidikan moral dan etika itu seharusnya dilakukan.

Moral dan etika harus dibina secara terus menerus. Prinsip pengajaran moral dan etika adalah melalui **Keterpanggilan, Keterlibatan, Keterundangan dan Keterikatan** anak didik terhadap konsep nilai moral dan etika yang akan ditampilkan.

Jadi moral tidak diajarkan secara langsung tetapi kita undang siswa untuk terlibat sehingga mereka menangkap pesan moral yang diinginkan. Mengajar moral dan etika secara langsung hanya memberikan pengetahuan moral dan etika kepada anak didik, tetapi tidak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu pengajaran moral harus menyentuh aspek manusia yang paling dalam dari diri manusia.

Hal ini sesuai dengan unsur dari ranah Afektif yang meliputi: Penerimaan, Partisipasi, penilaian/penentuan sikap, organisasi dan pembentukan pola hidup. Jadi kita undang siswa untuk terlibat dalam pengajaran moral. Keterlibatan siswa (engagement) secara aktif dalam pengajaran moral adalah sangat penting, karena keterlibatan itu memungkinkan guru untuk melakukan pembinaan moral dan etika secara baik. Dengan demikian pengajaran moral dan etika hendaklah diintegrasikan kedalam pokok bahasan (materi ajar) melalui metode-metode pengajaran moral yang relevan.

Pendidikan di Indonesia sampai hari ini dan mungkin juga pada masa akan datang adalah bersifat *Value based education* dan bukan *Value free education*. Oleh sebab itu pendidikan Indonesia mempunyai misi pembinaan moral dan etika yang jelas acuannya yaitu moral dan etika yang berdasarkan atas Pancasila dan Kebudayaan Indonesia serta UUD 1945.

6. Pola Pembelajaran Afektif

Strategi pembelajaran adalah keputusan yang diambil oleh seorang pendidik guna menyediakan situasi, kondisi, sarana dan serangkaian kegiatan yang memungkinkan seseorang peserta didik belajar dengan baik. Keputusan tersebut sangat penting dan salah mengambil keputusan membuat peserta didik tidak bisa belajar. Oleh sebab itu dinamakan keputusan strategis.

Belajar adalah kegiatan aktif peserta didik dalam membangun makna atau pemahaman guna memperoleh pengetahuan, sikap atau keterampilan. Oleh sebab itu

mengajar adalah membelajarkan peserta didik guna mendapatkan pengalaman belajar seorang peserta didik.

Sehubungan dengan itu pengajaran moral dan etika (Afektif) hendaklah juga didasarkan atas teori-teori belajar yang ada "*The evidence suggests that affective behaviors develop when appropriate learning experiences are provided for student much the same as cognitive behavior develop from appropriate learning experiences* (Bloom, 1956 : Book II : 20). Hal ini ditujukan agar pengajaran moral dan etika dapat menyentuh aspek yang paling dalam dalam diri anak didik sebagai manusia.

Jadi mengajar dalam pendidikan moral dan etika, kiranya sangat sesuai bila PBM-nya direkonstruksi berdasarkan teori belajar kognitif psikologi, karena teori ini memungkinkan guru melakukan pembinaan terhadap moral dan etika dalam PBM secara terintegrasi dengan materi yang ada.

Kegiatan PBM dapat dibagi atas tiga yaitu **pembukaan, kegiatan inti dan penutup**. Dalam kegiatan ini PBM yang sedang berlangsung, guru dapat melakukan pembinaan moral dan etika melalui berbagai metode pengajaran moral yang ada seperti teknik menilai diri sendiri, menilai naskah tulisan, metode pembuatan daftar dan metode pembuatan daftar dan metode lainnya. Metode ini sangat aplikatif dan tidak menghabiskan banyak waktu dan bahannya sangat banyak pada media cetak, dosen tinggal memilih dan mencocokkan dengan materi yang sedang diajarkan. Ingat prinsip umum dalam mengajar dan belajar adalah : *I listen, I forget; I see, I remember, and I do, I understand*. Maka keterlibatan siswa dalam setiap PBM adalah sangat penting.

Pola pendidikan dan pengajaran efektif (moral dan etika) seperti ini juga sesuai dengan empat pilar pendidikan yang direkomendasikan oleh Unesco (1996). Keempat pilar itu ialah: ***Learning to know, Learning to do, learning to live together dan learning to be***. Hal ini menyiratkan bahwa anak didik hendaklah didik bagaimana mencari dan menemukan nilai moral dan etika agar mereka bisa hidup

secara bersama. Empat pilar ini menyiratkan bahwa pendidikan moral dan etika haruslah dilakukan melalui pembinaan secara terus menerus sampai terjadi internalisasi dalam dirinya seperangkat nilai moral dan etika yang sangat perlu dalam membangun hubungan dan interaksi dengan diri sendiri, orang lain dan dengan Tuhan yang menciptakannya.

7. Azaz Pembelajaran Moral Dan Etika

Pengajaran moral dan etika adalah pengajaran yang bersifat penanaman nilai-nilai kedalam diri siswa melalui keterlibatan siswa kedalam situasi tertentu. Oleh sebab itu situasi kondusif untuk itu harus diciptakan oleh guru, sehingga misi penanaman dan pembinaan moral dan etika bisa dilakukan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa azaz pengajaran moral yang kiranya dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar moral dan etika.

- 1) Azaz Humanistik. Guru hendaklah melihat siswa sebagai manusia yang utuh dan tentunya memiliki sifat karakteristik manusia pada umumnya. Jadi PBM yang dibangun haruslah manusiawi dan tentunya harus kondusif untuk penanaman moral dan etika. Sebagai contoh dalam mengajarkan demokrasi hendaklah jangan dibawah ancaman, sebaliknya haruslah dalam suasana yang menyenangkan dan saling menghargai, sehingga sikap berdemokrasi bisa dibina dengan baik.
- 2) Azaz siswa sentris. Guru hendaknya selalu melakukan pembinaan secara terus menerus melalui pendekatan yang manusiawi. Jadi siswa adalah semntal dari kegiatan PBM yang diciptakan.
- 3) Azaz menyentuh emosi, hati dan kemauan siswa. Hal ini ditujukan agar siswa tahap internalisasi terhadap target moral dan etika yang sedang diajarkan. Pengajaran moral dan etika hendaklah selalu dilakukan

dengan suasana yang memungkinkan nilai-nilai moral etika untuk dibina.

- 4) Azas materi harus mudah dicerna Artinya adalah pesan moral dan etika yang disampaikan hendaknya mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Mulailah dari lingkungan siswa dan hal yang dilakukan sehari-hari. Contoh : kebersihan, antri, berbicara yang baik, bertegur sapa dengan orang lain dan sebagainya.

Dengan demikian pengajaran moral dan etika akan dapat mencapai sasaran yaitu menyentuh aspek terdalam dari jiwa manusia (anak didik). Akhirnya diharapkan terjadilah pembinaan nilai dan moral yang baik sesuai dengan nilai, norma dan kaidah yang berlaku secara lokal, nasional dan global.

8. Strategi Pembelajaran Nilai, sikap dan Pembentukan Karakter

Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) juga tidak jauh berbeda dengan mata-mata pelajaran lain. Bedanya adalah Pkn tidak saja menekankan aspek kognitif tetapi juga menekankan aspek afektif dan psikomotor. Besarnya porsi kognitif, afektif atau psikomotor dalam satu proses pembelajaran tergantung pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator yang dituju oleh topik pembelajaran yang akan dilakukan. Dengan demikian langkah-langkah pembelajaran Pkn adalah:

1. Pembukaan Pembelajaran. Pada bagian ini guru mengantarkan keadaan dan siswa kepada proses pembelajaran yang akan dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan apersepsi. Apabila keadaan dan peserta didik sudah masuk kepada situasi (*turn in*) pada iklim pembelajaran maka guru sudah boleh memulai proses pembelajaran. Kegiatan ini dapat dikototasikan kepada sebuah komputer, dimana data dapat di masukkan apa bila komputer sudah hidup, apa bila komputer belum hidup data tidak bias di masukkan.

2. Kegiatan inti. Pada bagian ini guru melakukan proses pembelajaran melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Pada bagian inilah guru melakukan penanaman dan pembinaan nilai guna pembentukan nilai, sikap dan karakter. Khusus untuk pembelajaran nilai, sikap dan pembentukan karakter guru harus menggunakan model-model pembelajaran yang akan diuraikan pada bagian ini.
3. Kegiatan penutup. Pada langkah ini guru akan menutup pembelajaran dengan pengambilan kesimpulan, pembuatan resume, konfirmasi nilai, sikap dan pembentukan karakter terhadap norma-norma yang berlaku ditengah masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian strategi pembelajaran nilai, sikap dan pembentukan karakter dapat dilakukan dengan kegiatan penanaman dan pembinaan nilai dalam kegiatan inti dalam proses pembelajaran.

9. Model-Model Pembelajaran Nilai, Sikap dan Pembentukan Karakter.

Salah satu model pembelajaran nilai, sikap dan pembentukan karakter adalah melalui *Model Value Clarification Technique* (VCT). Model VCT atau Teknik Mengklarifikasi nilai adalah model pembelajaran dengan teknik menggali untuk mengklarifikasi nilai guna memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan kajian bagi pencerahan suatu nilai dan moral untuk memperjelas sehingga siswa memahami, merasakan kebenaran dan manfaat dari suatu nilai sehingga nilai-nilai tersebut menjadi mempribadi, terintegrasi dalam system nilai pribadinya.

VCT adalah satu pendekatan dalam pendidikan nilai yang memberikan bantuan dalam proses pemahaman dan kesadaran pemilihan nilai serta kemampuan untuk menggunakannya dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan secara cerdas dan bermartabat. Hal ini ditujukan membantu peserta didik untuk memilih perbuatan yang

terbaik yang mendukung penampilan perilaku akhlak mulia sebagai warga masyarakat, bangsa dan Negara.

Pada bagian berikut ini akan ditampilkan model-model pembelajaran nilai, sikap dan pembentukan karakter yang paling mungkin dipraktikkan dan dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Perlu dicatat model ini sifatnya adalah bisa sebagai strategi pembelajaran utuh atau dapat juga sebagai suplemen bagi model pembelajaran yang dipilih dan dilakukan oleh guru dalam kelas. Yang penting adalah guru melakukan penanaman, pembinaan nilai, sikap serta pembentukan karakter anak didik.

a. VCT Model Pembuatan Daftar Kebaikan dan keburukan

1. Pengertian

Yaitu model pembelajaran nilai dengan menganalisa nilai melalui pernyataan yang dibuat dalam bentuk daftar tentang topik atau pokok bahasan yang akan dibahas. Daftar itu berisi nilai kebaikan dan keburukan secara bersama-sama. Daftar itu dapat dibuat oleh guru atau siswa atau guru dan siswa secara bersama-sama.

2. Pelaksanaan Operasionalnya

- Guru memberikan penjelasan tugas yang dilakukan siswa
- Menentukan lamanya waktu melaksanakan tugas.
- Meminta pendapat, alasan serta logika pemilihan nilai
- Guru memberikan kesimpulan

Contoh daftar kebaikan dan keburukan

Tujuan: 1 Membina kesadaran ; 2. Mematuhi kewajiban dalam etika masyarakat hukum

Judul: Daftar kebaikan dan keburukan dalam HAM dalam Kehidupan sehari-hari

No.	Pernyataan	Baik	Buruk
1.	Kerjakan setiap pekerjaan apapun asalkan halal		
2.	Percayakan saja masa depan kita kepada nasib		
3.	Jangan peduli dengan kesusahan orang lain		
4.	Yang penting diri dan		

	keluarga kita dapat hidup dengan baik		
5.	Laporkan setiap kejahatan yang kita ketahui		

Pembinaan nilai, sikap dan pembentukan karakter dapat dilakukan dengan mendiskusikan secara mendalam dan menggali alasan/rasional siswa sehingga diwaktu itulah guru dapat melakukan penanaman, pembinaan nilai, sikap dan pembentukan karakter. Guru dapat membuat berbagai daftar kebaikan dan keburukan sesuai dengan pokok persoalan yang akan dibahas.

b. VCT dengan Menentukan Tingkat Urutan (Rank Order)

1. Pengertian

Adalah tehnik pembelajaran nilai dan sikap melalui analisa pernyataan yang ada pada sebuah daftar. Peserta didik diminta membuat urutan/meranking (rank order) pernyataan-pernyataantersebut. Perlu dicatat bahwa daftar ini harus dipisah antara daftar kebaikan dan keburukan.

2. Pelaksanaan Operasionalnya

- Buat daftar kebaikan atau keburukan
- Guru meminta kelompok meranking pernyataan-pernyataan yang ada dalam daftar.
- Guru membuat kesimpulan/penegasan

3. Contoh VCT dengan Daftar Menentukan Urutan Nilai

Daftar: Urutan Kebaikan Kewajiban Manusia Dalam Kehidupan Masyarakat Menanggulangi Bencana Alam

No.	Pernyataan	Tingkat Urutan
1.	Mengunjungi tempat bencana	
2.	Memberikan sumbangan	
3.	Menunjukkan rasa haru atau sedih	
4.	Mengumpulkan dana untuk disumbangkan	
5.	Membantu secara langsung para korban ditempat bencana	

c. VCT Dengan Inkuiri Nilai/Games

a. Pengertian

Adalah strategi pembelajaran nilai, sikap dan pembentukan karakter melalui proses penemuan nilai melalui analisa naskah tulisan yang bersisi kasus yang memuat nilai-nilai yang dapat dibahas secara mendalam. Hal ini dapat dilakukan melalui pertanyaan – pertanyaan yang ditujukan guna pembinaan nilai dan sikap.

2. Langkah Operasional

- Pembukaan
- Mengemukakan Stimulus
- Mengklarifikasi permasalahan
- Analisa kasus dan menentukan posisi siswa
- Penutup

3. Contoh Cerita Inkuiri Nilai Menyelamatkan Korban Banjir

Desa Tanjung Jaya terkena musibah banjir besar. Rumah-rumah terendam, harta kekayaannya hanyut serta sejumlah korban manusia hilang dibawa banjir. Banjir adalah banjir bandang (dadakan dan bergelombang besar) yang melanda desa itu pada tengah malam yang sedang hujan lebat.

Disatu tanggul ditemukan delapan orang yang berhasil menyelamatkan diri dan terhempas disitu. Mereka itulah adalah:

1. Haji Basri, seorang tua berusia 70 tahun dan ulama ternama yang disegani penduduk. Beliau tamu undangan yang pada malam itu baru memberkahkan dakwah di desa tersebut. Dan dua hari kemudian beliau harus memberikan dakwah di kota lain
2. Guru IPA SMP desa itu yaitu Pak Adi. Beliau satu-satunya guru IPA dan mengajar di beberapa SMP dan SMA di daerah itu. Orangnyanya sangat baik dan disenangi siswa. Pak Adi kepalanya terantuk batu dan terus menerus mengeluarkan darah
3. Ibu Hadijah. Ibu kepala rumah yatim piatu yang mengasuh 50 anak yatim serta sangat pemurah dan baik hati. Ia disenangi dan menjadi tamatan hati anak asuhanyandan masyarakat
4. Seorang gadis cantik bernama Elvy yang patah kakinya dan terus menerus mengerang sambil memanggil nama

ayahnya. Elvy akan menikah minggu depan

5. Pak Kamal, ayah dari lima anak yang masih kecil-kecil. Beliau pedagang yang maju dan anggota DPRD kabupaten. Keadaannya sungguh sangat gawat dan memerlukan bantuan dokter segera
6. Ibu Nini, seorang ibu yang suami dan anaknya musnah terbawa hanyut dibawa air bah tengah malam.
7. Ibu Asih, janda yang baru setahun ditinggal mati suaminya dan ibu dari tiga orang anak. Salah seorang bayinya berusia 6 bulan sedang dirawat di rumah sakit
8. Peltu Cowad Halimah, yang sedang menjujuk orang tuanya didesa itu dan baru saja menikah dua minggu sebelumnya. Dia pingsan

Tugas Siswa: Seandainya kamu membawa perahu yang hanya mampu memuat lima orang saja (bila lebih akan karam) maka siapakah diantara mereka itu yang kalian selamatkan ? apa alasannya?

d. VCT dengan Menganalisa Nilai Melalui Naskah Tulisan

1. Pengertian

Adalah proses pembelajaran nilai, sikap dan pembentukan karakter melalui analisa naskah tulisan (cerita) yang memuat konflik nilai, sikap, kejadian dan mungkin digunakan sebagai sarana pembinaan nilai, sikap dan pembentukan karakter. Naskah yang akan dianalisa dapat dibuat oleh guru atau dapat juga diambil dari media cetak atau media lainnya.

2. Langkah Operasionalnya

- a. Guru memberikan naskah serta pedoman kerja
- b. Pedoman kerja berisikan:
 - Bacalah dan telaah secara seksama cerita ini
 - Tulislah pendapatmu atau penilaianmu mengenai bagian-bagian tertentu.

- Penilaian dimaksudkan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam cerita itu
- Penilaian ditulis dalam lembaran jawaban

c. Contoh VCT dengan Menilai Naskah Tulisan

“Pak Sani sudah lima tahun tidak membayar pajak. Bila petugas datang pak Sani selalu menghindar. Sabtu lalu petugas pajak datang dan berhasil menemui pak Sani. Dalam pertemuan itu petugas pajak meminta pak Sani membayar pajaknya tetapi pak Sani tidak punya uang. Pak Sani berjanji bulan depan tanggal 5 akan melunasi pajaknya. Tanggal 5 petugas pajak datang dan pak Sani menolak membayar pajaknya. Petugas membentak dan terjadilah pertengkaran. Akhirnya petugas kembali ke kantor dan melaporkan perilaku pak Sani kepada atasannya”.

e. **VCT dengan Menganalisa Nilai Secara Sederhana (Reportase)**

1. Pengertian

Adalah pembelajaran nilai melalui membuat reportase terhadap objek berupa gambar foto atau kejadian yang sebenarnya. Dalam menentukan objek reportase tentunya harus sesuai dengan SK, KD dan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran.

2. Langkah Operasionalnya

- a. Penampilan fakta atau objek. Misalnya kita tampilkan foto remaja yang sedang ngebut, foto orang dalam kecelakaan, foto rumah yang hancur akibat gempa bumi, foto anak yang cacat tubuh akibat terhimpit runtuhnya bangunan, foto akibat banjir. Dan lain-lain
- b. Tanggapan atau respon siswa. Disini siswa dilatih untuk menemukan dan menanggapi objek itu sesuai dengan pendapatnya
- c. Membina nilai, sikap dan karakter
- d. Penyimpulan secara bersama oleh guru dan siswa. Disinilah guru melakukan pembinaan terhadap nilai, sikap dan pembentukan karakter.

Model pembelajaran VCT ini dapat dilakukan secara utuh suatu pertemuan atau dapat juga dijadikan suplemen guna penanaman nilai, sikap dan pembentukan karakter dalam pertemuan tertentu. Guru dapat memilih model pembelajaran tertentu dan menulis/mencari stimulus yang sesuai dengan topic pembelajaran yang akan dilakukan. Model-model yang ditampilkan dalam modul ini adalah model yang mudah dan dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran di dalam kelas sehari-hari.

Catatan:

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ananda, Azwar (1997) *Teacher Questioning and Learning Outcomes in Severa Indonesian Social Studies Clasrooms*, Launceston : Disertasi di University of Tasmania (unpublished)
- Ananda, A. (2001) *A study of the education of Social Studies Teachers at the School of Educatiaon*, Indiana University: Laporan Penelitian (Unpulished)
- BSNP (2006) *Panduan Penyusunan KTSP*, Jakarta: BSNP
- Bertens K (1997) *Etika*, Jakarta : Gramedia.Blogdetik.com weblog (akses 6 april 2012)
- Dimiyati & Mudjiono (1994) *Belajar dan Pembelajaran*, Diknas P2LPTK
- Dirjen Dikti (1982), *Program Akta Mengajar Akta V-B*, Komponen Proses Belajar Mengajar, Jakarta : Dikti
- Kemendiknas (2010) ”*Rencana Induk Pengembangn Pendidikan Karakter Bangsa, Jakarta*” Kemendiknas.
- Dirjen Dikti Kemendiknas (2011) ”*Naskah akademik Pendidikan Karakter di PT*”, Bahan Pelatihan Dosen Pendidikan Pancasila dan KWN 14-16 November 2011, Jakarta: Dirjen Dikti
- Kariyawan, Bambang (2012) *Multikultural:Kado Untuk Indonesia*, Yogyakarta:Leutukaprio
- MPR RI (2011) *Panduan Pemasarakatan UUD45 dan Ketapan MPR Republik Indonesia*, Jakarta: Sekjen MPR RI
- Erie Sudewo (2011) *Best Praticce Charater Building: Menuju Indonesia Lebih Baik*, Jakarta:Republika Penerbit
- Hadiwardoyo, P (1990) *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta : Kanisius
- Makmurto, A & Soekarno (1989) *Etika (Filsafat Moral)*, Jakarta : Wira
- Manan, Imran (1989) *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*, Dinas : P2LPTK
- Noor Syam, M (1988) *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Surabaya : Usaha Nasional
- Prayitno&Afriva Khaidir (2010) *Model Pendidikan Karakter Cerdas*, UNP
- Permendiknas No.22/2006 tentang *Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Suciptoardi (2011) “*Pendidikan Karakter*”, Bahan Pelatihan Dosen Pancasila dan Pkn, Jakarta: Dirjen dikti 14-16 November 2011.
- Undang-undang No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Unesco (1996) *Learning : The Treasure Within*, Unesco : France
- Ahmad kosasih Jahiri (1988) *Stratgi pembelajaran IPS/Pkn Bandung*: IKIP Bandung
- Kemendiknas (2004) *Kurikulum 2004*, Standar Kompetensi Pkn
- Banks, James A. (1997) *Educating Citizens in a Multi cultural Sociaty*, New York Teachers College Columbia University Press.
- Bishop, J.J. (1999) *Conceptions of Democracy and Citizenship and Citiciv Education in the Czech Republic A Comparison of Teach ers and Students in thee Types of Secondary Schools*, University of Iowa: Ph.D Thesis (unpullished).
- Butts, R. Freeman (1980) *The Revival of Civic Education: A rationale for Citizenship in American School*, Palo alto (California): Phi Deltan Kappa.
- Contreras, Gloria (1990) “International Perspectives on Research in Social Studies”. *Social Studies*, 81 (6), 287-290.

- Crowl, T.K.(1993) *Fundamentals of Educational Research, Indianapolis*: Brown Communication, Inc.
- Diamond, L. (1996) *Cultivating Democratic Citizenship: Education for a New Century of Democracy in the America*, Cititas Conference, Buenos Aires, September 20- October 2.
- Fischer, John M. (1999) *Negotiating School and University Relationships in the Context of Polish Civic Education Reforms*, The Ohio State University: Ph.D Dissertation (unpublished).
- Encyclopedia Americana* (1999), Danbury: Grolier Inc.
- Engle, S. & Ochoa, A.S. (1988) *Education for Democratic Citizenship: Decision Making in the social Studies*, New York: Teacher College, Columbia University.
- Enslin, P.(2000) "Education and Democratic Citizenship: In Defense of Cosmopolitan", In Mal Leicester, Celia Modgil & sohan Modgil, Politics, *Education and Citizenship*, New York: Falmer Press.
- Gaylord, W. (2000) *Civic Education Reform in Indonesia: Proposal for a Policy one Education (Proposed for 2002 or 2003 after 2 years of Planning and one year of Implementation)*, Bloomington: School of Education-Indiana University.
- Good, T.L. & Brophy, J.E. (2000) *Looking in Classrooms*, New York: Addison Wesley Longman, Inc.
- Hlebowitsh, P.S. & Hamot, G. (1999) "Pragmatism and Civic Education Reform in the Czech Republic". *The Educational Forum*, 63 (3), 260-270.
- Home Pages of the School of Education, Indiana University.*
- Interview recordings with School of Education Faculties Members.*
- Karyadi, B. (1994) *Kurikulum Sekolah Menengah Umum, In Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II*, Kurrikulum untuk Abad 21, Jakarta: Grasindo
- Longstreet, Wilma. S. (1989) " Education for Citizenship: New Dimensions". *Social Education*, 53 (1), 41-45.
- Marciano, John (1997) *Civic Literacy and Education: The Battle for the Hearts and Minds of American Youth*, New York: Peter Lang.
- Marsh, C.& Stafford, K. (1984) *Curriculum: Australian Perspectives and Issues*, Sydney: McGraw Hill Company.
- Morse, Suzanne, W. (1998) *Renewing Civic Capacity: Preparing College Students for Service and Citizenship*, Washington DC: The George Washington University Press.
- Huda, N. (2001) "Pengajaran PPKn di Sekolah dan PT Gagal". *Kompas*, Feb. 12, 9.
- Patrick, J.J. & Sarma, V. (1997) " Civic Education and The Advancement of Democracy In Latvia". *International Journal of Social Education*, 1w2 (2), 27-37.
- Patrick, John, J. (1999) "Concepts at the Core of Education and for Democratic Citizenship" in Charles F. Bahmueller & John J. Patrick (1999) *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspective andProjects.*
- Quigley, C.N. & Hoar, J.N. (1997) Cititas: An Internasional Civic Education Exchange Program". *International Journal of social Education*, 12 (2), 11-26.
- Reimers, Elonora, V. (1994) *Education for democracy: The Roles of Schools*, Washington D.C: US. Agency for Internasional Dvelopment.
- Remy, Richard C. & Strzemleczny (1997) "Education for democratic Citizenship in Poland". *International Journal of Social Education*, 12 (2), 38-61.

- Ridley, Helen.S. & Hidveghi, B.& Pitts, A. (1997) "Civic Education for Democracy in Hungary". *The National Journal of Social Education*, 12 (2), 62-72.
School of Education Bulletin 2000/2002, Indiana University.
- Shanker, A. (1997) "Education and Democratic Citizenship: Where We Stand" *International Journal of Social Education*, 12 (2), 1-10.
- Splitter, L. (1997) "Philosophy and Democracy in Asia and the Pacific: Philosophy and Civic Education". *Thinking*, 13 (3), 6-16.
- The World Book Encyclopedia* (1999), Chicago: World Book Inc.
- Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H. & Schulz, W. (2000) *Citizenship and Education in Twenty-Eight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen*, Amsterdam: IEA Secretariat.
- Windarto, B.B. (1996) "Mungkinkah Kebiasaan Bertanya di Sekolah ' *Kompas*, May, 14-1996
- White, C. (1997) " Indonesian Social Studies Education :A Critical Analysis". *The Social Studies*, 88, 87-91 Mr/Ap.
- U.S Agency For Internasional Development (1994) *Civic Education in School Systems of Latin Aamerica and The Caribbean*, Washington D.C: Academy for Educational Development.
- Karyadi, B. (1994) *Kurikulum Sekolah Menengah Umum, In Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II*, Kurikulum untuk Abad 21, Jakarta: Grasindo
- Longstreet, Wilma. S. (1989) "Education for Citizenship: New Dimensions". *Social Education*, 53 (1), 41-45.
- Marciano, John (1997) *Civic Literacy and Education: The Battle for the Hearts and Minds of American Youth*, New York: Peter Lang.
- Marsh, C.& Stafford, K. (1984) *Curriculum: Australian Perspectives and Issues*, Sydney: McGraw Hill Company.
- Morse, Suzanne, W. (1998) *Renewing Civic Capacity: Preparing College Students for Service and Citizenship*, Washington DC: The George Washington University Press.
- Huda, N. (2001) "Pengajaran PPKn di Sekolah dan PT Gagal". *Kompas*, Feb. 12, 9.
- Patrick. J.J. & Sarma, V. (1997) " Civic Education and The Advancement of Democracy In Latvia". *International Journal of Social Education*, 1w2 (2), 27-37.
- Patrick, John, J. (1999) "Concepts at the Core of Education and for Democratic Citizenship" in Charles F. Bahmueller & John J. Patrick (1999) *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspective and Projects*.
- Quigley, C.N. & Hoar, J.N. (1997) Cititas: An Internasional Civic Education Exchange Program". *International Journal of social Education*, 12 (2), 11-26.
- Reimers, Elonora, V. (1994) *Education for democracy: The Roles of Schools*, Washington D.C: US. Agency for Internasional Dvelopment.
- Remy, Richard C. & Strzemleczny (1997) "Education for democratic Citizenship in Poland". *International Journal of Social Education*, 12 (2), 38-61.
- Ridley, Helen.S. & Hidveghi, B.& Pitts, A. (1997) "Civic Education for Democracy in Hungary". *The National Journal of Social Education*, 12 (2), 62-72.
School of Education Bulletin 2000/2002, Indiana University.
- Shanker, A. (1997) "Education and Democratic Citizenship: Where We Stand" *International Journal of Social Education*, 12 (2), 1-10.

- Splitter, L. (1997) "Philosophy and Democracy in Asia and the Pacific: Philosophy and Civic Education". *Thinking*, 13 (3), 6-16.
- The World Book Encyclopedia* (1999), Chicago: World Book Inc. Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H. & Schulz, W. (2000) *Citizenship and Education in Twenty-Eight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen*, Amsterdam: IEA Secretariat.
- Windarto, B.B. (1996) "Mungkinkah Kebiasaan Bertanya di Sekolah ' *Kompas*, May, 14-1996
- White, C. (1997) " Indonesian Social Studies Education :A Critical Analysis". *The Social Studies*, 88, 87-91 Mr/Ap.
- U.S Agency For Internasional Development (1994) *Civic Education in School Systems of Latin Aamerica and The Caribbean*, Washington D.C: Academy for Educational Development.
- Butts, R. Freeman (1980) *The Revival of Civic Education: A Rationale for Citizenship in American School*, Palo Alto (CA.): Phi Delta Cappa
- Encyclopedia Americana* (1999), Danbury: Grolier Inc.
- Goodlad, John, J. (1996) "Democracy, Education and Community" dalam Roger Soder (ed), *Democracy, Education and the School*, San Fransisico: Jossey-Bass Publ.
- Niemi, Ricahrd, G. & Junn, J. (1998) *Civic Education: What Make Students Learn*, New Haven: Yale University Press.
- The World Book Encyclopedia* (1999), Chicago: World Book Inc.